

## **Analisis Kuadran Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen**

**Sri Endah Wulandari, Rutiana Dwi Wahyunengseh**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret  
email: sriendahwuladari\_15@student.uns.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kebumen berbasis pada Data Kesejahteraan Sosial. Mengingat fenomena kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dalam kehidupan karena sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten memiliki jumlah yang cukup tinggi sehingga menyebabkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian terkait kemiskinan di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan analisis kuadran. Adapun analisis kemiskinan tersebut berbasis pada Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kebumen. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Kemiskinan, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan datanya, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi dengan menggunakan sumber data sekunder dari Kementerian Sosial yang dirilis melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

**Kata Kunci:** Kemiskinan; Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan; DTKS; Analisis Kuadran

### **Abstract**

This research aims to analyze poverty that occurs in Kebumen Regency based on Social Welfare Data. Considering that the phenomenon of poverty is a very complex problem in life because it is closely related to social problems that occur in society. The poverty problem that occurs in this Regency is quite high, causing Kebumen Regency to become the regency with the highest percentage of poverty in Central Java. So it is important to conduct research related to poverty in Kebumen Regency using quadrant analysis. The poverty analysis is based on Kebumen Regency Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). The concepts used in this research include poverty, poverty reduction policy, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) and quadrant analysis. This research uses descriptive quantitative research. In collecting data, this research used documentation study techniques using secondary data sources from the Kementerian Sosial which were released through the Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. It is hoped that the results of this research can be used as a reference for policy makers in formulating poverty reduction policies in Kebumen Regency.

**Keywords:** Poverty; Poverty Reduction Policy; DTKS; Quadrant Analysis

## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan salah satu isu krusial yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan ini dimaknai sebagai kondisi dalam suatu keterbatasan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights sebagaimana dalam Collins (2020), kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan sumber daya, kemampuan, pilihan, keamanan, dan kekuasaan yang diperlukan untuk menikmati standar hidup yang memadai. Pengertian tersebut juga dapat disederhanakan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang disebabkan karena pendapatan masyarakat yang rendah.

Kemiskinan merupakan sesuatu yang harus diberantas agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kemudian pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan-kebijakan strategis terkait penanggulangan kemiskinan. Mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan pada setiap negara bermacam-macam, kebijakan penanggulangan kemiskinan pada suatu negara disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan masing-masing negara. Adapun Indonesia dalam upaya memerangi kemiskinan, juga memiliki beberapa strategis kebijakan yang menjadi prioritas nasional salah satunya melalui pembangunan.

Didukung dengan program pembangunan yang dicanangkan oleh BAPPENAS melalui Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan program pembangunan yang bertujuan untuk mengubah paradigma pembangunan menuju pembangunan yang berkelanjutan (Bappenas, 2020). Pembangunan berkelanjutan ini berorientasi pada kesetaraan serta hak asasi manusia dalam rangka mencapai pembangunan pada aspek ekonomi, sosial serta lingkungan hidup. Terdapat 17 tujuan pembangunan yang menjadi prioritas dalam SDGs. Adapun tujuan pertama dari SDGs adalah Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun. Hal ini sebagai upaya dalam mewujudkan Indonesia Tanpa Kemiskinan. Tujuan tersebut merupakan salah satu tujuan utama yang juga menjadi acuan berbagai tujuan pembangunan lainnya. Mengingat dengan tercapainya tujuan dihapuskannya kemiskinan secara tidak langsung juga terdapat pada aspek lainnya diantaranya pariwisata, infrastruktur, energi dan sebagainya.

Menilik permasalahan kemiskinan di tingkat daerah, terdapat salah satu kabupaten yang menempati peringkat teratas dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah yakni Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah yang mencapai 17,59% pada tahun 2020. Tercatat bahwa Kabupaten Kebumen menempati posisi pertama dengan kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah selama 2 tahun berturut-turut. Berdasarkan data yang dirilis BPS dalam Analisis Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2020 menyebutkan bahwa Kabupaten Kebumen ini memiliki iklim pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 5 persen. Terhitung dari tahun

2016 - 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari 5,01% hingga menjadi 5,58%. Namun seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tersebut tidak diikuti dengan penurunan kemiskinannya.

Seperti data yang telah disebutkan di atas, Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah ini mencapai 17,59%. Sedangkan rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 11,41%. Tingginya persentase kemiskinan tersebut salah satunya disebabkan oleh belum meratanya pendapatan masyarakat. Mengingat terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen selama empat tahun dari 2016 hingga 2019 tidak diikuti dengan menurunnya kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen belum efektif karena justru menimbulkan angka kemiskinan baru. Merujuk dari pendapat Harbani dalam Maluegha, dkk (2018) yang menyatakan bahwa tercapainya efektivitas kebijakan dapat dilihat dari tepatnya sasaran yang dituju. Adapun salah satu ketepatan sebuah sasaran kebijakan dapat dilihat dari permasalahan yang ada di lokasi. Dengan mengidentifikasi permasalahan di lokasi, kemudian dapat dirumuskan apa yang menjadi sasaran prioritas dari kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut kemudian menjadi sebuah rujukan bagi Pemerintah untuk menentukan sasaran dalam mencanangkan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengeluarkan basis data kemiskinan yang disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat menjadi DTKS ini merupakan sumber data yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan program perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran (Kementerian Sosial, 2020).

Merujuk pada permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang mengalami peningkatan sehingga menyebabkan persentase kemiskinan Kabupaten Kebumen tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen belum efektif. Berdasarkan konsep Harbani yang menyatakan bahwa tercapainya efektivitas kebijakan dapat dilihat dari tepatnya sasaran yang dituju, peneliti bermaksud untuk mengkaji konsentrasi elemen indikator kemiskinan pada lokasi yang tepat di Kabupaten Kebumen yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## **Metode**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu metode penelitian yang berupa proses menumbuhkan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Margono dalam Samsu, 2017). Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Selain itu didukung dengan pendapat Sugiyono

(2013) yang menyatakan bahwa pada penelitian kuantitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan terkait data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulannya.

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan data dengan menggunakan analisis kuadran. Analisis kuadran merupakan sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara membagi data ke dalam sumbu x dan sumbu y. Pada sumbu x mewakili garis horizontal dan sumbu y mewakili garis vertikal. Dalam kedua sumbu tersebut, kemudian data terbagi menjadi empat kuadran. Sehingga selanjutnya pada empat kuadran tersebut, data dapat diinterpretasikan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Melihat pada upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan namun tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan ini menjadikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya efektif. Jika merujuk dari Nugroho dalam Larantika (2017) yang menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas kebijakan didasarkan pada 5 indikator antara lain ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target sasaran, ketepatan lingkungan serta ketepatan proses. Ketepatan sasaran menjadi salah satu indikator dalam melihat efektivitas kebijakan karena dalam pelaksanaannya mencakup target yang menjadi prioritas kebijakan. Adapun salah satu upaya dalam memenuhi target atau sasaran prioritas kebijakan agar efektif dalam implementasinya maka diperlukan sebuah data yang informatif dan akurat yang mencakup informasi masyarakat secara detail. Dalam hal ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hadir sebagai basis data terpadu yang digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial serta program bantuan sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis kemudian bermaksud untuk menganalisis persebaran kemiskinan di Kabupaten Kebumen dengan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan mengacu pada 4 faktor penentu kemiskinan yang telah dikemukakan oleh *World Bank* (2007). Keempat faktor tersebut dikemukakan oleh *World Bank* yang berdasar dari sij Adapun diataranya 1) Pendidikan, aspek pendidikan merupakan salah satu aspek utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yakni dengan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya pada faktor yang kedua yakni 2) Pekerjaan, yang merupakan sumber dari masyarakat untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor pekerjaan ini memiliki pengaruh terhadap besaran pendapatan masyarakat. Semakin rendah pendapatan yang dimiliki seseorang tentunya semakin sulit juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sektor pekerjaan dalam hal ini memiliki pengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Secara umum sektor pekerjaan formal lebih memiliki kestabilan pendapatan dibanding dengan sektor pekerjaan non formal.

Pada faktor selanjutnya yakni 3) Gender, peran gender sebagai kepala keluarga berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Secara umum pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat perekonomian lebih rendah dibanding dengan rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki. Dan yang terakhir yakni faktor 4) Infrastruktur yang berkaitan dengan akses terhadap pelayanan serta infrastruktur/fasilitas dasar. Kemiskinan dinilai berkaitan dengan faktor ini dilihat dari fakta bahwa semakin rendahnya pendapatan seseorang tentunya semakin sulit untuk mencapai atau memiliki akses terhadap pelayanan serta infrastruktur masyarakat.

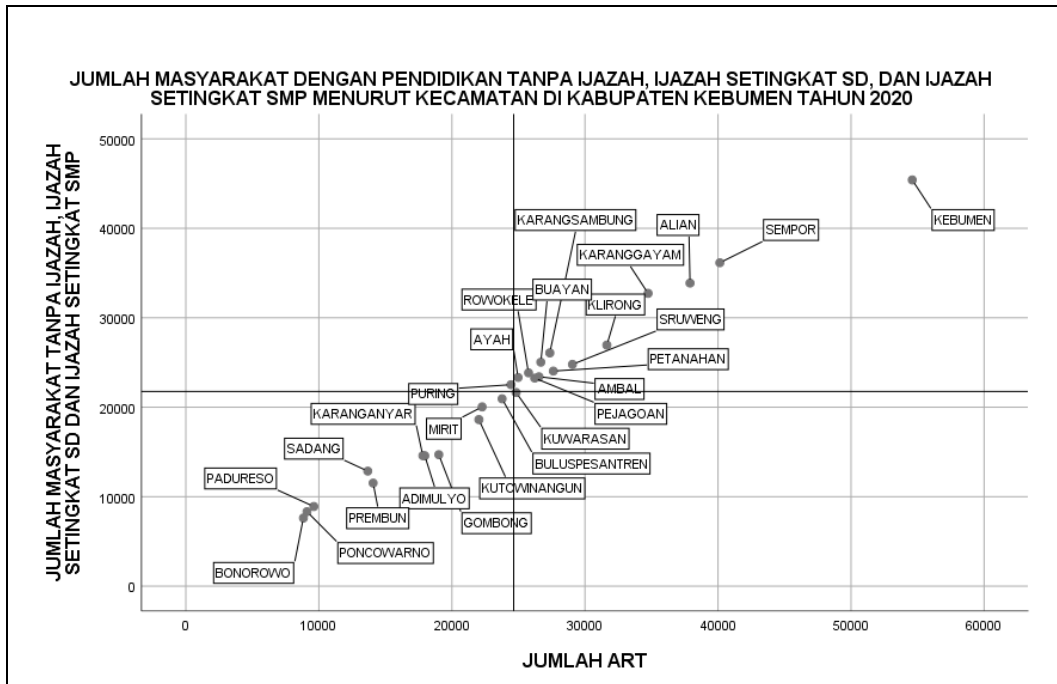
**a) Pendidikan**

Pentingnya peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Mengingat bahwa kemiskinan dapat ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat. Maka dari itu, pemerintah memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan semakin terciptanya tingkat pendidikan yang tinggi maka semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang juga berpengaruh terhadap kesempatan untuk memiliki pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sehingga kemudian dilakukan analisis kuadran terkait dengan penyebaran masyarakat miskin berdasarkan pada capaian aspek pendidikan. Berikut disajikan data masyarakat berdasarkan capaian tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kebumen pada tahun 2020.

**Gambar 1.**

**Peta Kuadran Sebaran Jumlah Masyarakat dalam DTKS dengan Jumlah Masyarakat Tanpa Ijazah, Ijazah Setingkat SD dan Ijazah Setingkat SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen**



Kuadran 2:  
 1. Kecamatan Puring (24.438, 22.518)

Kuadran 1:  
 1. Kecamatan Kebumen (54.601, 45.402)  
 2. Kecamatan Sempor (40.133, 36.148)  
 3. Kecamatan Alian (37.896, 33.872)  
 4. Kecamatan Karanggayam (34.743, 32.729)  
 5. Kecamatan Klirong (31.645, 26.944)  
 6. Kecamatan Karangsambung (27.356, 26.075)  
 7. Kecamatan Buayan (26.681, 25.034)  
 8. Kecamatan Sruweng (29.056, 24.789)  
 9. Kecamatan Petanahan (27.620, 24.041)  
 10. Kecamatan Rowokele (25.755, 23.842)  
 11. Kecamatan Ambal (26.543, 23.408)  
 12. Kecamatan Ayah (24.974, 23.328)  
 13. Kecamatan Pejagoan (26.224, 23.256)

<p>Kuadran 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Buluspesantren (23.771, 20.942)</li> <li>2. Kecamatan Mirit (22.270, 20.038)</li> <li>3. Kecamatan Kutowinangun (22.026, 18.617)</li> <li>4. Kecamatan Gombong (19.012, 14.702)</li> <li>5. Kecamatan Karanganyar (17.814, 14.587)</li> <li>6. Kecamatan Adimulyo (17.962, 14.574)</li> <li>7. Kecamatan Sadang (13.673, 12.859)</li> <li>8. Kecamatan Prembun (14.078, 11.523)</li> <li>9. Kecamatan Padureso (9.621, 8.905)</li> <li>10. Kecamatan Poncowarno (9.103, 8.327)</li> <li>11. Kecamatan Bonorowo (8.836, 7.615)</li> </ol>	<p>Kuadran 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Kuwarasan (24.823, 21.649)</li> </ol>
--	---

Sumber: Hasil olah data sekunder

Pada tabel diatas disajikan terkait dengan jumlah masyarakat yang tidak memiliki ijazah atau tidak menempuh pendidikan sama sekali serta masyarakat dengan capaian pendidikan setingkat SD dan SMP yang terbagi menjadi 4 kuadran. Dalam kuadran tersebut disajikan terkait jumlah masyarakat dengan capaian pendidikan tersebut dikarenakan pada capaian pendidikan tersebut belum memenuhi standar capaian yang telah ditetapkan pemerintah dalam program Wajib Belajar 12 tahun.

Seperti yang telah disajikan pada gambar kuadran di atas, terdapat pembagian empat kuadran kecamatan di Kabupaten Kebumen yang didasarkan pada tingkat capaian pendidikan masyarakat miskin yang berbasis pada DTKS. Keempat kuadran tersebut menghasilkan lokasi-lokasi yang kemudian dapat dilihat sebagai lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan berdasarkan letak lokasi kuadrannya. Adapun prioritas tersebut dilihat dengan adanya kuadran 1 yang mengindikasikan bahwa banyaknya jumlah masyarakat miskin diikuti dengan banyaknya masyarakat miskin yang tidak memiliki ijazah. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan pada aspek pendidikan terkait dengan implementasi bantuan sosial pendidikan untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu di Kabupaten Kebumen diprioritaskan merujuk pada wilayah kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran 1 diatas.

Adapun pada kuadran 1 terdapat 13 kecamatan dengan jumlah masyarakat miskin tanpa ijazah terbanyak di Kabupaten Kebumen. Secara umum banyaknya jumlah masyarakat miskin tanpa ijazah tersebut disebabkan oleh sulitnya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari aksesibilitas untuk mengakses pendidikan seperti biaya seragam, buku, alat tulis, atau biaya transportasi yang dapat menjadi beban finansial yang berat bagi keluarga miskin. Mereka mungkin tidak

mampu membayar biaya ini secara teratur atau bahkan tidak mampu mengakses pendidikan yang berkualitas karena keterbatasan finansial.

Keterbatasan finansial yang dialami masyarakat miskin ini kemudian menjadi sebuah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam membiayai pendidikan sehingga menghasilkan tingginya angka masyarakat yang tidak memiliki ijazah atau yang tidak mengenyam pendidikan.

Selain itu terdapat juga faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan. Mengingat pentingnya fasilitas sarana dan prasarana dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada daerah-daerah miskin seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah yang berlokasi di daerah miskin cenderung memiliki kurangnya sarana dan prasarana, guru yang kurang berkualitas, atau kurikulum yang tidak memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan menurunkan minat serta motivasi siswa untuk mengaksesnya.

#### **b) Pekerjaan**

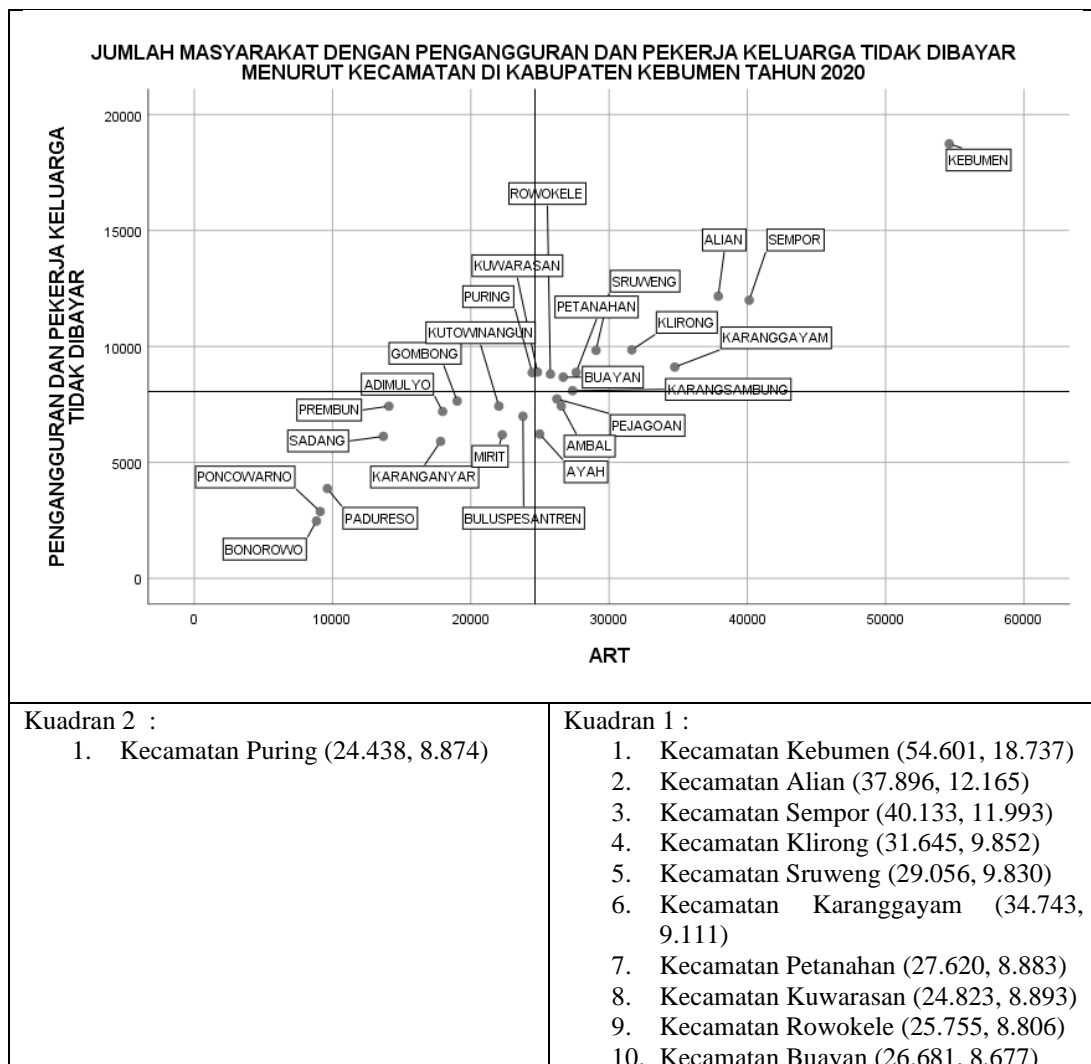
Pekerjaan merupakan salah satu aspek yang dapat menjelaskan kondisi kemiskinan pada suatu daerah. Mengingat bahwa aspek pekerjaan merupakan kunci dari pendapatan atau penghasilan yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dalam melakukan pengukuran kemiskinan juga berkaitan dengan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin rendahnya pendapatan yang dimiliki seseorang tentunya berdampak pada keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak adanya pemasukan menjadikan sulitnya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mengingat kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat. Jika dari aspek pendapatan sangat minim atau tidak ada pendapatan tentu saja hal ini menjadi salah satu aspek yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.

Pemerintah Kebumen telah mengimplementasikan beberapa kebijakan yang mampu menangani permasalahan ketenagakerjaan antara lain tercapainya penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen yang semula dari 6,12% menjadi hanya 4,76%. Capaian tersebut tentu saja membawa dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kebumen. Namun hal tersebut tidak bertahan lama mengingat bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka kembali menjadi 6,07%. Adapun peningkatan ini terjadi salah satunya dikarenakan mewabahnya pandemi *covid-19* yang juga berpengaruh terhadap aspek ketenagakerjaan. Pandemi tersebut menyebabkan banyak perusahaan untuk menghentikan aktivitas produksinya yang kemudian berdampak kepada kebijakan untuk merumahkan karyawannya. Hal tersebut dikarenakan tidak berjalannya aktivitas atau mobilitas masyarakat seperti pada umumnya. Peningkatan angka pengangguran terbuka inilah yang juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen.



Kemudian pada aspek pekerja keluarga/tidak dibayar merupakan seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar. Selain itu juga bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti keluarga yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar. Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

**Gambar 2**  
**Peta Kuadran Sebaran Jumlah Masyarakat dalam DTKS dengan Jumlah Pengangguran dan Pekerja Tidak Dibayar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen**



Kuadran 2 :

1. Kecamatan Puring (24.438, 8.874)

Kuadran 1 :

1. Kecamatan Kebumen (54.601, 18.737)
2. Kecamatan Alian (37.896, 12.165)
3. Kecamatan Sempor (40.133, 11.993)
4. Kecamatan Klirong (31.645, 9.852)
5. Kecamatan Sruweng (29.056, 9.830)
6. Kecamatan Karanggayam (34.743, 9.111)
7. Kecamatan Petanahan (27.620, 8.883)
8. Kecamatan Kuwarasan (24.823, 8.893)
9. Kecamatan Rowokele (25.755, 8.806)
10. Kecamatan Buayan (26.681, 8.677)

	11. Kecamatan Karangsembung (27.356, 8.092)
<p>Kuadran 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Gombong (19.102, 7.648)</li> <li>2. Kecamatan Kutowinangun (22.026, 7.425)</li> <li>3. Kecamatan Prembun (14.078, 7.425)</li> <li>4. Kecamatan Adimulyo (17.962, 7.194)</li> <li>5. Kecamatan Buluspesantren (23.771, 6.993)</li> <li>6. Kecamatan Sadang (13.673, 6.122)</li> <li>7. Kecamatan Mirit (22.270, 6.191)</li> <li>8. Kecamatan Karanganyar (17.814, 5.906)</li> <li>9. Kecamatan Padureso (9.621, 3.870)</li> <li>10. Kecamatan Poncowarno (9.103, 2.882)</li> <li>11. Kecamatan Bonorowo (8.836, 2.471)</li> </ol>	<p>Kuadran 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Pejagoan (26.224, 7.735)</li> <li>2. Kecamatan Ambal (26.543, 7.434)</li> <li>3. Kecamatan Ayah (24.974, 6.224)</li> </ol>

Sumber: Hasil olah data sekunder

Seperti yang telah ditampilkan pada tabel di atas terkait dengan jumlah masyarakat dengan jumlah pengangguran dan jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar di Kabupaten Kebumen. Pada tabel diatas yang termasuk ke dalam kuadran 1 yang merupakan termasuk ke dalam wilayah prioritas sasaran kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasar pada aspek pekerjaan terkait dengan pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada kuadran 1 merupakan wilayah dengan tingginya jumlah pengangguran dan jumlah masyarakat dengan pekerjaan yang tidak dibayar diikuti dengan jumlah masyarakat yang tinggi mengindikasikan pada wilayah tersebut memiliki permasalahan terkait dengan tingginya jumlah pengangguran dan jumlah masyarakat dengan pekerjaan tanpa bayaran. Sehingga dalam hal ini lokasi prioritas terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pelatihan kerja serta penyaluran lowongan kerja untuk masyarakat di prioritaskan untuk wilayah kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran 1.

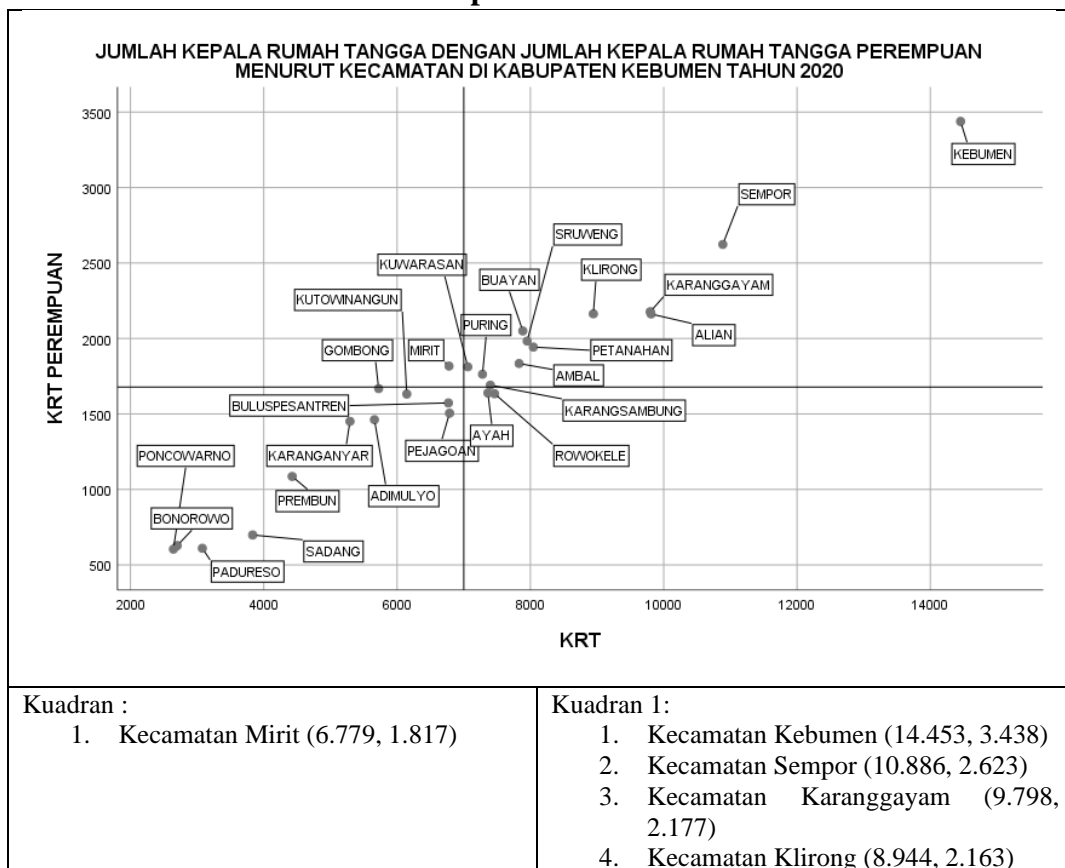
Jika menilik lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan beberapa kecamatan memiliki jumlah pengangguran dan pekerja tidak dibayar yang tinggi di Kabupaten Kebumen. Adapun salah satunya yakni rendahnya capaian pendidikan serta ketidaksesuaian keterampilan. Rendahnya capaian masyarakat yang dalam hal ini ditunjukkan dengan tingginya jumlah masyarakat tanpa ijazah di Kabupaten Kebumen yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Mengingat dengan terbukanya lowongan pekerjaan memiliki persyaratan yakni minimal capaian pendidikan pada seseorang. Sehingga dalam hal ini jika masih tingginya angka masyarakat tanpa ijazah tentunya berdampak pada pekerjaan yang dimiliki masyarakat. Semakin rendah capaian pendidikan masyarakat semakin rendah pula peluang untuk mendapat pekerjaan yang mapan. Serta semakin rendah pula peluang untuk keluar dari kemiskinan.

**c) Gender**

Peran gender dalam suatu tatanan konstruksi sosial merupakan peranan yang sangat penting dalam membedakan tugas dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Sebagaimana pendapat Noerdin, dkk. (2006) menyatakan bahwa gender merupakan berbagai atribut dan tingkah laku yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki dan dibentuk oleh budaya. Dari sini muncul gagasan tentang apa yang dipandang pantas dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan perbedaan atribut tersebut seringkali kemudian menjadi salah satu penyebab ketimpangan antara gender perempuan dan laki-laki yang cenderung merugikan perempuan.

Kemiskinan memiliki kaitan yang erat dengan gender. Perempuan seringkali menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Berikut merupakan persebaran jumlah kepala rumah tangga perempuan berdasarkan pada DTKS Kabupaten Kebumen tahun 2020 yang diharapkan dapat dijadikan sebagai data rujukan atau acuan dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis gender.

**Gambar 3**  
**Peta Kuadran Sebaran Jumlah Masyarakat dalam DTKS dengan Jumlah Masyarakat Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen**



	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Kecamatan Alian (9.811, 2.162)</li> <li>6. Kecamatan Buayan (7.886, 2.050)</li> <li>7. Kecamatan Sruweng (7.951, 1.983)</li> <li>8. Kecamatan Petanahan (8.044, 1.943)</li> <li>9. Kecamatan Ambal (7.830, 1.834)</li> <li>10. Kecamatan Kuwarasan (7.061, 1.812)</li> <li>11. Kecamatan Puring (7.281, 1.763)</li> <li>12. Kecamatan Karangasambung (7.339, 1.691)</li> </ul>
<b>Kuadran :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Gombang (5.723, 1.668)</li> <li>2. Kecamatan Kutowinangun (6.145, 1.632)</li> <li>3. Kecamatan Buluspesantren (6.770, 1.573)</li> <li>4. Kecamatan Pejagoan (6.787, 1.505)</li> <li>5. Kecamatan Adimulyo (5.660, 1.462)</li> <li>6. Kecamatan Karanganyar (5.293, 1.451)</li> <li>7. Kecamatan Prembun (4.426, 1.086)</li> <li>8. Kecamatan Sadang (3.383, 698)</li> <li>9. Kecamatan Bonorowo, (2.702, 628)</li> <li>10. Kecamatan Poncowarno (2.644, 604)</li> </ul>	<b>Kuadran :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Ayah (7.362, 1.639)</li> <li>2. Kecamatan Rowokele (7.462, 1.634)</li> </ul>

Sumber: Hasil olah data sekunder

Dari gambar diatas diketahui bahwa terdapat sebaran kecamatan yang didasarkan pada banyaknya jumlah kepala rumah tangga perempuan yang termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun beberapa kecamatan tersebut yang termasuk ke dalam kuadran 1 mengindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga perempuan tertinggi di Kabupaten Kebumen. Hal ini menjadikan wilayah kuadran 1 menjadi lokasi sasaran prioritas dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada gender di Kabupaten Kebumen. Adapun pelaksanaan kebijakan penganggulangan kemiskinan tersebut dapat berupa Bantuan Sosial Pemberian Permakanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Diharapkan melalui kebijakan tersebut dapat mewujudkan kondisi kesetaraan gender yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat serta menurunkan kemiskinan.

Peningkatan kemiskinan ini terutama dapat dilihat pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan yang rentan masuk ke dalam kondisi kemiskinan. Rentannya perempuan untuk masuk ke dalam kondisi kemiskinan dapat dilihat dari sajian gambar pada kuadran diatas yang menyajikan beberapa kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran 1 dengan jumlah rumah tangga miskin dengan jenis kelamin perempuan terbanyak di Kabupaten Kebumen.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perempuan lebih rentan untuk masuk ke dalam kondisi kemiskinan terutama peran perempuan sebagai kepala rumah tangga. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain disebabkan oleh aspek pendidikan rendah. Capaian pendidikan yang rendah pada perempuan ini

berimplikasi pada keterampilan sumber daya yang dimiliki. Rendahnya capaian pendidikan tentu menyebabkan terbatasnya keterampilan yang dimiliki. Perbedaan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan antara perempuan dan laki-laki dapat berkontribusi pada kesenjangan upah gender.

Kemudian pada faktor selanjutnya yakni terdapat ketimpangan penghasilan antara perempuan dan laki-laki. Faktor ini merupakan perluasan dari faktor capaian pendidikan yang rendah yang berdampak pada keterbatasan terhadap keterampilan yang dimiliki. Sehingga hal ini menyebabkan ketimpangan penghasilan antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan penghasilan berdampak pada pemenuhan kebutuhan di rumah tangga dengan perbandingan jumlah tanggungan anggota keluarga. Selain itu, Arbiyanti, (2020) menyatakan bahwa terjadinya kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yakni perempuan tidak dikategorikan sebagai angkatan kerja. Hal ini dikarenakan perempuan biasanya menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh rumah tangganya sendiri. Pekerjaan rumah tangga tersebut sudah melekat pada tugas seorang perempuan yang kemudian mempengaruhi ketersediaan perempuan dalam bekerja.

#### **d) Infrastruktur**

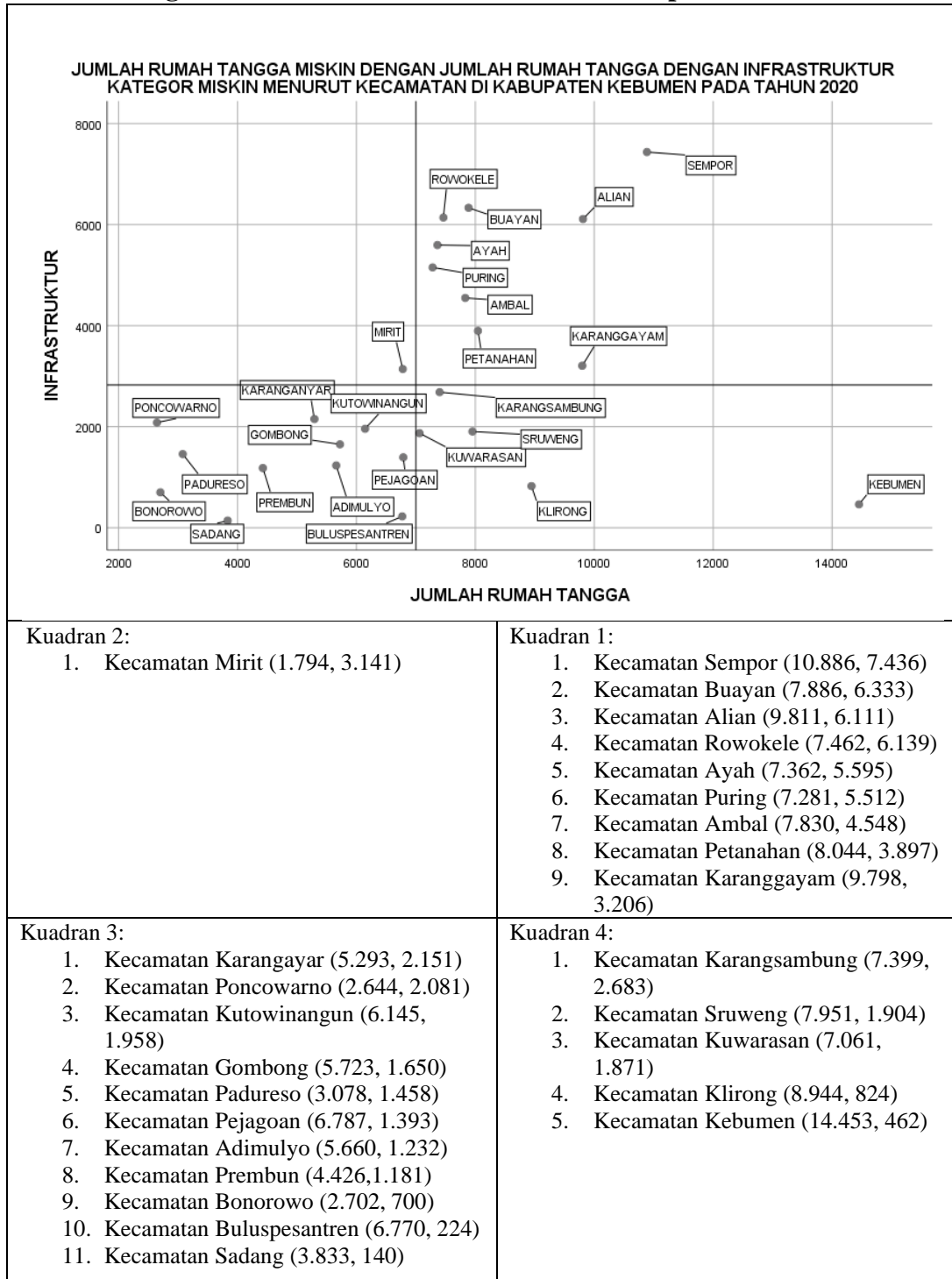
Aspek infrastruktur dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Semakin rendah atau kecil akses masyarakat terhadap fasilitas serta infrastruktur maka semakin erat kaitannya dengan kemiskinan (World Bank, 2007). Adapun menurut Meidiana & Marhaeni (2019) infrastruktur sendiri mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Sehingga infrastruktur itu sendiri secara langsung juga memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Infrastruktur mengacu pada berbagai fasilitas fisik, sistem, dan struktur yang dibangun atau dikembangkan dalam suatu wilayah atau negara untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, ekonomi, dan sosial.

Adapun kriteria kemiskinan yang didasarkan pada infrastruktur menurut perundang-undangan yakni pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin antara lain :

- 1) Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
- 2) Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng.

Berikut merupakan penyebaran jumlah rumah tangga dengan jenis infrastruktur yang termasuk kategori miskin yang berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020

**Gambar 4**  
**Peta Kuadran Sebaran Jumlah Masyarakat dalam DTKS dengan Infrastruktur**  
**Kategori Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen**



Sumber: Hasil olah data sekunder

Seperti yang telah tersaji pada gambar diatas, terdapat penyebaran kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan infrastruktur kategori miskin antara lain a) Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran; dan b) Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng. Adapun kedua kategori tersebut merupakan kategori yang juga termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sehingga sajian data ini merupakan penyelarasan dengan basis data DTKS Kabupaten Kebumen.

Sajian data diatas merupakan sebaran jumlah rumah tangga miskin dengan infrastruktur dasar rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin yang terbagi ke dalam 4 kuadran. Adapun dari keempat kuadran tersebut lokasi utama prioritas kemiskinan dilihat dari beberapa kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran 1. Dalam kuadran 1 tersebut menyajikan kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin dengan jenis infrastruktur dasar rumah tangga kategori miskin terbanyak di Kabupaten Kebumen. Sehingga dalam hal ini sasaran lokasi prioritas kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan terkait dengan aspek infastruktur adalah wilayah kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran 1 diatas.

Adapun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dapat diimplementasikan terkait dengan aspek infrastruktur antara lain program Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM). Program P2MKM ini merupakan salah satu program kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui perbaikan atau renovasi bangunan rumah yang tidak layak huni untuk peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat kurang mampu sehingga terwujud rumah yang memenuhi persyaratan layak huni secara teknis, kesehatan, dan kecukupan luas. Program ini dalam pelaksanaannya mengacu pada data kemiskinan yang termasuk ke dalam basis data Rumah Tidak Layak Huni serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Adapun kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam kuadran 1 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yakni minimnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Sehingga keadaan ini yang kemudian menjadikan masyarakat untuk memilih infrastruktur yang sesuai dengan penghasilan masyarakat itu sendiri. Jika melihat pada data yang telah tersaji, jumlah rumah tangga dengan infrastruktur kategori miskin yang termasuk ke dalam kuaran 1 secara umum berisikan beberapa kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi di Kabupaten Kebumen.

## **Penutup**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemetaan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kebumen

Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan analisis peta kuadran yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke dalam 4 aspek penentu kemiskinan antara lain aspek pendidikan, pekerjaan, gender dan infrastruktur. Yang kemudian menghasilkan beberapa lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sehingga penentuan lokasi prioritas dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat didasarkan pada kajian analisis kuadran pada penelitian ini untuk mengurangi resiko ketidaktepatan sasaran dan meningkatkan ketepatan sasaran ketepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan

### Referensi

- Arbiyanti, H 2020, 'Perempuan Dan Karier: Perbandingan Kesenjangan Upah Gender Di Indonesia Dengan Negara-Negara Di Eropa', Jurnal Hawa, vol. 2, no.2. Collins, F, L 2020, *Poverty (Ed.)*, *International Encyclopedia of Human Geography*, Elsevier, Canada.
- Bappenas n.d, *Tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals)*, Bappenas, (<http://sdgs.bappenas.go.id/>)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia 2021, Data terpadu kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, (<https://dtkk.kemensos.go.id/>).
- Larantika, A, A, D 2017, 'Efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung, SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), vol. 8, no. 2, pp. 125-129.
- Maluegha, F, Sambiran, S, & Lopian, M 2018, 'Efektivitas kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro' *Jurnal Eksekutif*, vol.1, no. 1.
- Meidiana, N & Marhaeni, A 2019, 'Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur dan Pendidikan Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin', *Buletin Studi Ekonomi*, vol. 24, no. 1.
- Noerdin, E, Agustini, E, Pakasi, T, Aripurnaini, S & Hodijah, S, N 2006, *Potret kemiskinan perempuan*, Women Research Institute, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2022, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK2022, tentang Kriteria Fakir Miskin, Jakarta.
- Samsu, S 2017, *Metode penelitian : (teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development)*, Pustaka Jambi, Jambi.
- Sugiyono 2013, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- The World Bank 2007, *Era baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (terjemahan)*, The World Bank, Indonesia.